



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU**

Nomor SOP	:	W.32.SDM.7.OT.02.02-01
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	18 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	18 Juni 2024
Disahkan Oleh	:	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau,   Ditandatangani secara elektronik oleh : Aditya Sarsito Sukarsono NIP. 197509181999031001
Nama SOP	:	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

DASAR HUKUM :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai komputer
2. S1

KETERKAITAN :

- SOP Biro Kepegawaian

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer / Printer / Scanner
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Jaringan Internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kanwil	Kepala Badiklat	Kasubbag Tata Usaha	Pengelola Kepegawaian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melengkapi persyaratan dan diusulkan oleh atasan						Data	1 Hari	Dokumen	Ujian Dinas: - PNS telah memiliki pangkat: - Juru Tk.I Gol I/a Ujian Dinas Tk.I - Pengatur Tk.I Gol II/d Ujian Dinas Tk.II - Penata Tk.I Gol III/d Ujian Dinas Tk.III - PNS telah memiliki pangkat tersebut di atas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun - PNS tidak sedang menjalani hukdis atau dlm proses penajatuhan hukdis - Fotocopy SK Pangkat terakhir dan dilegalisir - Fotocopy SK Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan - Pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 lembar Penyesuaian Ijazah: - PNS: -Untuk S1, pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b) -Untuk S2, pangkat minimal Penata Muda (III/a) - untuk S1 yang pengangkatannya dari DIII, pangkat minimal Pengatur (II/c) - Ijazah yang diperoleh relevan dengan tugas pokok dan fungsinya
2	Menyerahkan berkas persyaratan kepada Pengelola Kepegawaian						Data	10 Menit	Dokumen	
3	Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas persyaratan						Data	1 Hari	Dokumen	
4	Menandatangani legalisir berkas persyaratan dan memberikan disposisi kepada Kasubbag TU untuk membuat Surat Pengantar						Dokumen	2 Hari	Disposisi	
5	Memberikan disposisi kepada Pengelola Kepegawaian untuk membuat konsep Surat Pengantar						Dokumen	1 Hari	Disposisi	
6	Menyusun konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM						Dokumen	1 Hari	Surat	
7	Memeriksa, mengoreksi data pendukung dan memparaf surat pengantar						Surat	1 Hari	Surat	
8	Menandatangani surat pengantar untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM						Surat	2 Hari	Surat	
9	Mendigitalisasi berkas fisik menjadi format digital						Dokumen	1 Hari	Dokumen	
10	Melakukan pendaftaran pada aplikasi SIMPEG melalui fitur seleksi						Dokumen	1 Hari	Dokumen	

										3. Didapat dengan kuliah reguler (bukan kelas jauh dan kelas sabtu-minggu) 4. IPK minimal 2,00 5. Ijazah diperoleh program studi terakreditasi 6. Tidak dalam proses penjatuhan hukdis 7. Memiliki surat ijin belajar setingkat eselon II 8. Tidak sedang menduduki JFT dan pada saat pengangkatan CPNS bukan menduduki formasi JFT. Proses Penentuan Kelulusan ditentukan oleh Biro Kepegawaian
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---